

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-13, Rineka Cipita, Jakarta.
- Carter, Megan dan Andrew Bouris, *Freedom of Information: Balancing The Public Interest*, (London: The Constitution Unit School of Public Policy UCL, 2008).
- Dipopramono, Abdulhamid, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta.
- Emirzon, Joni, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance – Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, Thomson West, Eagan – Minnesota.
- Harahap, Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Haryanto, Ignatius, 2005, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi*, Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan UNESCO.
- Hidayat, Papang, dkk., 2011, *Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian*, Kontras.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.

- Iswahyudi, Aries, dkk, “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No.2 Desember 2016.
- Kelly, David, et.al, 2005, *Business Law*, 5<sup>th</sup> Edition, Cavendish Publishing Limited, London.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Total Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, Ridwan, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, January 2013.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik*, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG.
- Mendel, Toby, 2008, *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*, UNESCO, Paris.
- Mulhadi, 20010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Narayana, Gede, “Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Sebagai Lembaga Non Struktural”, *Paper*, Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi, Yogyakarta, 22-24 November 2016. Lihat dalam M.Z. Al-Faqih (Editor), 2006, *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Partodihardjo, Soemarno, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2-3
- Pramono, Nindyo, “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Redjeki Hartono, et.al, ed, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum BisnisPersembaan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta,
- Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2014.

Prayitno, Dessy Eko, dkk, *Modul Bagi Badan Publik: Melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Center for Law and Democracy, Seri Pelatihan KIP bagi Badan Publik 2013.

Purwosutjipto, H.M.N., 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. ke-8, Djambatan, Jakarta.

Raharjo, Budi dan Iskandar Saharudin, 2013, *Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik*, Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) untuk Program Community Access to Information (CATI).

Rifai, Akhmad, “Kemerdekaan Informasi: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi”, *Jurnal Dakwah*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember, 2008.

Riyanto, Bambang, 2015, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE-Yogyakarta.

Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati, 2017, *Hukum Keuangann Negara: Teori dan Praktik*, cet. ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subagiyo, Henri, et.al, 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.

Subekti, Henricus dan Mulyoto, 2012, *Badan Usaha: Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Sulasamono, Bambang Suteng, “Problem Solving: Signifikansi, Pengertian dan Ragamnya”, *Setya Widya*, Vol. 28, No. 2, Desember 2012.

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394)

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 011/III/KIP-PS/2016 Antara Mustolih dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 087/III/KIP-PS-M-A/2012 Antara PT Rolika Caterindo dengan PT BNI Syariah.

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 199/VI/KIP-PS-A/2014 Antara Forum Supporter Indonesia dengan PSSI.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756)

### **Website**

Ashadiqa, Arruya, “Kesiapan Indonesia dalam Nasionalisasi Perusahaan Asing Mineral dan Batubara”, <http://hmt.mining.itb.ac.id/kesiapan-indonesia-dalam-nasionalisasi-perusahaan-asing-mineral-dan-batubara/>. Diakses pada 02 Mei 2018.

Government of India – Ministry of Law and Justice, *Right to Information Act, 2005* (Act No. 22 of 2005). Diakses dari <http://righttoinformation.gov.in/rti-act.pdf> pada 01 Mei 2018.

Komisi Informasi Pusat, “PN Tangerang Tolak Gugatan Alfamart ke KIP”, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/pn-tanggerang-tolak-gugatan-alfamart-ke-kip>. Diakses 09 November 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Bukan Badan Hukum, [http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_badan\\_usaha.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf). Diakses pada 1 Februari 2018.

Pengadilan Negeri Tangerang, Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui [http://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil_perkara). Diakses pada 03 Mei 2018.

Public Access to Information and Secrecy Act: Information concerning public access to information and secrecy legislation, etc., <https://regeringen.se/contentassets>. Diakses pada 01 Mei 2018.

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 011/III/KIP-PS/2016 Antara Mustolih dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, <https://www.komisiinformasipusat.go.id/daftarputusan>. Diakses pada 8 November 2018.

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 199/VI/KIP-PS-A/2014 Antara Forum Supporter Indonesia dengan PSSI, <https://www.komisiinformasipusat.go.id/daftarputusan>. Diakses pada 26 April 2018.

United Nations, “Universal Declaration of Human Right”, [www.un.org/udhr\\_booklet\\_en\\_web](http://www.un.org/udhr_booklet_en_web). Diakses 07 November 2017.

Yosep Adi Prasetyo, “Hak-hak Sipil dan Politik”, *Makalah*, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, Makasar, 2010. Diakses dari <https://www.pusham.uui.ac.id/files> pada 26 Februari 2018.